



e-ISSN3032-601X & p-ISSN3032-7105

Vol. 1, No. 2, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 2, 2024

Pages: 230-234

Merancang Konsep Ekonomi Kebijakan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Elza Rachmawati, Eli Apud Saepudin, Dina Dwi Apriani, Aulia Fitriani, Lia Rosiana

Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1453>

How to Cite this Article

APA : Rachmawati, E., Saepudin, E. A., Apriani, D. D., Fitriani, A., & Rosiana, L. (2024). Merancang Konsep Ekonomi Kebijakan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 230 - 234. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1453>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Merancang Konsep Ekonomi Kebijakan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Elza Rachmawati^{1*}, Eli Apud Saepudin², Dina Dwi Apriani³, Aulia Fitriani⁴, Lia Rosiana⁵

Universitas Bina Bangsa, Serang Banten, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

Email: elsarahmawati771@gmail.com^{1*}, eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id²,
dinadwiapri24@gmail.com³, auliafitriani271205@gmail.com⁴, lia367052@gmail.com⁵

Diterima: 03-04-2024 | Disetujui: 04-04-2024 | Diterbitkan: 05-04-2024

ABSTRACT

This research is a literature review of the Economic Policy Package launched by President Joko Widodo in 2015. The Economic Policy Package consists of several volumes. When it was first launched, namely Volume 1, the economic policy package aimed to stimulate the real sector and drive the economy. Volume 1 of the Economic Policy Package is one of 16 economic policy packages launched until 2018. A review of the literature related to the Economic Policy Package volume 1 was conducted to identify the latest research related to economic policy packages and provide an assessment of the effectiveness of the Government's policies related to the Economic Policy Package.

Keywords: Policy; Economy; Stimulus; Effectiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur terhadap Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Paket Kebijakan Ekonomi terdiri dari beberapa jilid. Pada saat pertama kali diluncurkan, yaitu Jilid 1, paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk menstimulasi sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 merupakan salah satu dari 16 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan hingga tahun 2018. Kajian literatur terkait Paket Kebijakan Ekonomi jilid 1 dilakukan untuk mengidentifikasi penelitian terkini terkait paket kebijakan ekonomi dan memberikan penilaian terhadap efektivitas kebijakan Pemerintah terkait Paket Kebijakan Ekonomi. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur terhadap Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Paket Kebijakan Ekonomi terdiri dari beberapa jilid. Pada saat pertama kali diluncurkan, yaitu Jilid 1, paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk menstimulasi sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 merupakan salah satu dari 16 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan hingga tahun 2018. Kajian literatur terkait Paket Kebijakan Ekonomi jilid 1 dilakukan untuk mengidentifikasi penelitian terkini terkait paket kebijakan ekonomi dan memberikan penilaian terhadap efektivitas kebijakan Pemerintah terkait Paket Kebijakan Ekonomi.

Katakunci: Politik; Ekonomi; Stimulus; Efektivitas.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa regulasi yang banyak menghambat ekonomi dan investasi. Kewajiban seperti Izin Lingkungan, Analisis dampak lingkungan (Amdal) dan kewajiban Izin Mendirikan bangunan (IMB) menyulitkan investor. Oleh sebab itu, regulasi yang banyak harus dikurangi, serta kewajiban Amdal dan IMB dalam perizinan investasi harus dihapuskan. Masalahnya tentu akan berbeda bila masalah regulasi tidak hanya dari segi jumlah, misalnya seperti adanya regulasi yang tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, masalah ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, sampai masalah proses pembentukan yang tidak partisipatif sehingga regulasi yang lahir menerima penolakan dari masyarakat. Bila demikian, tentu untuk mengatasi masalah regulasi tidak cukup hanya sampai omnibus law. Sepintas, omnibus law memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan omnibus law pun tidak akan efektif. (Jokowi, 2016).

Indonesia pada tahun 2014, strategi Indonesia dapat dikatakan telah berubah, terutama sejauh masalah kelautan. Hal ini sering tidak bisa dibedakan dengan kewibawaan Jokowi yang membuat isu Kelautan sebagai isu utama dalam pemerintahannya. Bukan administrasi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang sudah lama mengklaim hal tersebut namun tidak mempermasalahkan isu kelautan sebagai isu atau kunjungan pemerintah. Di bawah pemerintahan Jokowi, itu sebenarnya jelas apa kebutuhan otoritas publik selama jangka waktu berikut, terutama sejauh strategi Indonesia. Jokowi menggunakan Ide Tri Sakti Soekarno sebagai alasan lima tahun berikutnya (Al-Syahrin, 2018:17).

Dalam nawacita sebagai visi yang diracanakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan cita ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi melalui upaya menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ekonomi digital akan dikaitkan dengan perspektif kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional untuk kemandirian dan daya saing bangsa. (Mukeri 2012).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif dari studi literasi yang diambil dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi kelesuan ekonomi global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tiga langkah utama yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi untuk mengatasi pelemahan ekonomi global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah: Stabilisasi ekonomi makro melalui langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi kelesuan ekonomi global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berbicara dalam konteks Indonesia, sejak KTT Washington yang diselenggarakan sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan global, G20 telah menjadi platform untuk berdialog di antara para

kepala negara dan pemerintahan dari 20 negara. Sejak saat itu, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) telah menghadiri KTT G20 secara rutin. Kontribusi Indonesia dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan ekonomi di G20 telah menunjukkan keseriusan dan komitmennya. Seperti pada tahun 2010, sejumlah gagasan inti dari Indonesia menjadi dasar dari Seoul Development Consensus for Shared Growth (Hornung, 2017).

Dalam upaya pengendalian inflasi di Indonesia, sektor pangan yang diwakili oleh beras menjadi salah satu indikator penting dalam pergerakan inflasi di Indonesia. Beras merupakan sektor pangan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pada tahun 2021, produksi beras di dalam negeri dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri, namun diperlukan stok cadangan untuk menjaga kekurangan stok beras di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan impor beras untuk menutupi stok cadangan yang dianggap kurang (Sawit, 2008).

Berdasarkan kinerja dan jumlah kapal yang ditenggelamkan, terlihat jelas bahwa terdapat perubahan dalam pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan TPPI. Terdapat berbagai alasan mengapa terjadi perubahan kebijakan terhadap penenggelaman kapal pencuri ikan berbendera asing, antara lain adanya pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Aditya & Purnomo, 2018) (Nadlir, 2018).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011).

Situasi di Asia Timur juga dipenuhi dengan berbagai peristiwa yang saling bertentangan dan tak terduga. Sementara perkembangan ekonomi yang dinamis, stabil dan kondusif selama 10 tahun terakhir membuat negara-negara di kawasan ini lebih fokus pada pemulihan ekonomi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini juga memiliki potensi konflik, permusuhan, dan perselisihan akibat warisan politik Perang Dingin yang masih membekas dalam hubungan internasional (Yuliartono, 2009, p. 1).

Selain itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan ekonomi menengah dalam standar ekonomi global, Indonesia aktif dalam keanggotaan Group of 20 (G20) dan MINT (Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki) yang menunjukkan bahwa pengukuran ekonomi Indonesia yang ditentukan dengan menggunakan PDB menunjukkan fakta bahwa tingkat pertumbuhan riil PDB per kapita Indonesia dari tahun 1960 sampai 2000 di antara 112 negara adalah sebesar 1,8% per tahun. Termasuk pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia sejak awal tahun 1970-an pada masa kepemimpinan Soeharto (Barro 2008).

Segala bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari pengobatan hingga program kebijakan yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat secara langsung. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat antara lain berupa uang tunai, sembako, pemotongan tarif listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi (Zakiah et al, 2020).

Keterkaitan dalam kebijakan industri otomotif seperti kendaraan murah dan ramah lingkungan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya terus berjalan di pemerintahan Joko Widodo saat ini. Ketua Umum Gaikindo Sudirman MR melihat bahwa setiap tahunnya pertumbuhan industri otomotif roda empat mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terbukti pada tahun 2006 penjualan kendaraan roda empat mencapai 318 ribu menjadi 433 ribu pada tahun 2007 berlanjut pada tahun 2008 mencapai titik 603 ribu hingga pada tahun 2013 akhir dapat mencapai 1.998.000 unit yang mendekati angka 2 juta unit (Marketeers, 2014).

dalam hal ini, sering kali merevisi target rencana produksi tahunan untuk mengakomodasi permintaan batu bara yang lebih tinggi dari perkiraan semula. Pada tahun 2019, jumlah batu bara yang dikeruk mencapai puncak tertinggi dalam sejarah Indonesia, yaitu sebesar 616,16 juta ton atau setara dengan 9% dari total produksi batu bara dunia (Statistical Review of World Energy, 2020).

Rasionalitas adalah konsep dasar yang digunakan oleh Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan sadar dan pilihan yang diekspresikan oleh tindakan tersebut. Definisi rasional di sini adalah masuk akal. Weber mencontohkan orang membeli baju dengan harga murah daripada harga mahal adalah hal yang rasional (Doyle, 1994:220).

Untuk menyebarkan kebijakan tersebut, digunakanlah buzzer, mereka bertugas mendengungkan kebijakan tersebut agar diterima dan ditangkap oleh masyarakat sebagai konstruksi pemikiran. Seperti yang dijelaskan oleh Iman Brotoseno yang merupakan salah satu buzzer yang menyerang para pengkritik kebijakan pembangunan infrastruktur dengan cuitan pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 5.40 WIB: "Yang mengkritik Jokowi membangun infrastruktur sebaiknya jangan mudik lewat jalan tol. Lewat jalan yang dibangun Daendels saja" (Gunadha & Bhayangkara, 2020).

Ekonomi politik global saat ini menjadi fenomena yang sedang berkembang di kancah internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya isu kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed). Banyak pendapat yang muncul terkait kenaikan suku bunga acuan tersebut, terutama kekhawatiran Amerika Serikat terhadap dominasi perdagangan China saat ini. Dilihat dari aspek ekonomi negara, Amerika Serikat merasa "terancam" dengan perkembangan ekonomi China di berbagai kawasan. China secara tidak langsung berusaha untuk mendominasi perdagangan di Asia, Eropa, Amerika Latin, Oseania, Amerika, dan Afrika. (Zhou & Leung, 2015)

KESIMPULAN

Konsep kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi mencakup berbagai aspek yang menitikberatkan pada peningkatan diplomasi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyatnya yang berdikari di bidang ekonomi. Hal ini diturunkan ke dalam sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita, dimana salah satu dari sembilan prioritas tersebut adalah diplomasi ekonomi. Pemerintahan Jokowi memprioritaskan transformasi fundamental ekonomi yang didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi, mengubah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur, dan mengubah kebijakan subsidi menjadi lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintahan Jokowi juga memperbaiki kondisi penentu FDI (Foreign Direct Investment) di Indonesia dan mengurangi hambatan-hambatan yang ada. Pada masa jabatan pertamanya, Jokowi berusaha merealisasikan gagasan-gagasan besarnya terkait pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan tol laut dan tol darat, pembangunan waduk, pembangkit listrik, kereta api cepat, pembangunan pelabuhan, dan jalan raya. Semua ini adalah bagian dari upaya pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbiyyu, Mohammad Darry, dan Diah Asri Nindyaswari. "Penggunaan Buzzer dalam Hegemoni

- Pemerintahan Joko Widodo." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 1.2 (2022): 70-81.
- Adzanas, Adrian, dkk. "RUPIAH DALAM BAYANGAN EKONOMI POLITIK GLOBAL." *Jurnal Hubungan Internasional* 2.1 (2022): 73-86.
- Al Ayubi, Sholahudin, and Riady Raffiudin. "Oligarchic Domination of Natural Resources: A Case Study of Indonesia's Dependence on the Coal Industry during Joko Widodo's Administration." *JISIP (Journal of Social Science and Education)* 7.3 (2023): 2533-2546.
- Astuti, Ngudi, dan Ida Zubaedah. "Kebijakan Publik Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Indonesia Periode ke-2 Tahun 2019-2024." *Jurnal Perspektif-Jayabaya Jurnal Administrasi Publik* 22.2 (2023): 157-171.
- Astuti, Wiwiek Rukmi Dwi, dan Laode Muhamad Fathun. "Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo." *Intermestic: Jurnal Studi Internasional* 5.1 (2020): 47-68.
- BAGIR, MOHAMAD. "ANALYSIS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY SECTOR POLICY IMPLEMENTATION DURING THE JOKO WIDODO ADMINISTRATION." (2019).
- Hasanah, Ilmiatul, Jeni Susyanti, and Budi Wahono. "Analysis of the Financial Performance of Real Estate and Property Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange Before and During President Jokowi's Administration." *Journal of Warta Ekonomi* 6.01 (2017).
- Idat, Dhani Gunawan. "Memanfaatkan era ekonomi digital untuk memperkuat ketahanan nasional." *Jurnal Lemhannas RI* 7.2 (2019): 5-11.
- Krismeidanarta, Arsaja. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL IKAN PELAKU TPPI DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO. Diss. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2023.[2/4 12.06]
- Mulia, Melati. "INDONESIA'S MEDIATION STRATEGY IN DEALING WITH THE KOREAN PENINSULA CONFLICT DURING THE ADMINISTRATION OF PRESIDENT JOKO WIDODO FOR THE 2014-2019 PERIOD." (2021).
- Pamungkas, Bagaskara Ari, Christian HJ De Fretes, and Putri Hergianasari. "KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP IMPOR BERAS TAHUN 2021." *Administraus* 7.2 (2023): 1-13.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia*
- Sa'adah, Kurniawati, Probo Darono Yakti, dan Siti R. Susanto. "Mengevaluasi 4 tahun Kebijakan Tol Laut Jokowi: Konsep konektivitas Indonesia-Sentris untuk pemerataan ekonomi" *Mengevaluasi 4 tahun Kebijakan Tol Laut Jokowi: Konsep konektivitas Indonesia-Sentris untuk pemerataan ekonomi.* Masyarakat, Budaya dan Politik 32.3 (2019): 290-302.
- Saniah, Muhammad Rafli, nd Isrina Siregar. "Dinamika Kebijakan Poros Maritim Indonesia pada masa Pemerintahan Joko Widodo Periode Tahun 2014-Sekarang." *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 1.2 (2021): 64-72.
- Wahyuddin, Y. A., Raka Maypangestu Hidayat, dan Tri Ridho Verdiansyah. "STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI BIRU INDONESIA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI ERA JOKO WIDODO." *Sriwijaya Journal of International Relations* 2.2 (2022): 70-87.